
**PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAN
PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI
SUMATERA BARAT**

**Nadilla¹, Nindia Gracella², Della Gustina³, Frenzi Susilawati⁴, Nindi Dia Sapitri⁵,
Ansofino⁶**

Universitas PGRI Sumatera Barat, Padang

e-mail: ¹Ansofino2001@yahoo.com, ²dilanadilla574@gmail.com,

³nindiagracella23@gmail.com, ⁴delagustina987@gmail.com,

⁵Frenzisusilawati04@gmail.com, ⁶nindidiasapitri22@gmail.com

Abstract: *This study aims to examine the influence of the Human Development Index (HDI) and Government Expenditure (PP) on economic growth in West Sumatra Province. The data used is panel data covering 19 districts/cities during the 2020–2024 period, with a total of 95 observations. The research data is sourced from the Central Statistics Agency (BPS) and analyzed using the Fixed Effect Model (FEM) through the Panel Least Squares method. The analysis results show that simultaneously, the HDI and government expenditure have a significant influence on economic growth. Partially, the HDI is proven to have a positive and significant effect on economic growth, indicating that improving the quality of human resources through education, health, and public purchasing power plays an important role in driving regional economic growth. Conversely, government expenditure has a positive but insignificant effect on economic growth. These findings indicate that government expenditure in West Sumatra Province has not been fully optimal in driving economic growth during the study period. Therefore, improving the quality of human development is a key factor in accelerating economic growth, while the effectiveness of management and allocation of government expenditure needs to be continuously improved to provide a more optimal impact on the regional economy..*

Keyword: *Human Development Index (HDI), Government Expenditure, Economic Growth.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengeluaran Pemerintah (PP) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan berupa data panel yang mencakup 19 kabupaten/kota selama periode 2020–2024, dengan total 95 observasi. Data penelitian bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dianalisis menggunakan Fixed Effect Model (FEM) melalui metode Panel Least Squares. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan IPM dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara parsial, IPM terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya, pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah di Provinsi Sumatera Barat belum sepenuhnya optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi selama periode penelitian. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pembangunan manusia menjadi faktor utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, sementara efektivitas pengelolaan serta alokasi pengeluaran pemerintah perlu terus ditingkatkan agar memberikan dampak yang lebih optimal terhadap perekonomian daerah..

Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya (Tondi et al., 2025). Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi dipahami sebagai proses peningkatan kapasitas produktif perekonomian yang berlangsung secara berkelanjutan dari waktu ke waktu, sehingga menghasilkan peningkatan pendapatan serta output nasional (Anitasari & Soleh, 2025). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara dan merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh setiap negara (Mayasari & Mahinshapuri, 2022). Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai kondisi meningkatnya pendapatan masyarakat yang disebabkan oleh bertambahnya produksi barang dan jasa dalam perekonomian (Prasasti, 2022). Selain itu, pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan kemampuan jangka panjang suatu negara dalam menyediakan berbagai jenis barang dan jasa ekonomi dalam jumlah yang semakin besar bagi penduduknya (Angraini et al., 2023).

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan meningkatnya kapasitas produksi potensial suatu negara, yang tercermin dari pertumbuhan output per kapita serta peningkatan standar hidup masyarakat (Doni, 2022). Dalam perspektif jangka panjang, pertumbuhan ekonomi menggambarkan kemampuan suatu negara untuk terus meningkatkan produksi berbagai barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan penduduknya (Saefulloh et al., 2023). Pertumbuhan ekonomi juga dipahami sebagai fenomena ekonomi jangka panjang yang menunjukkan perkembangan suatu negara

melalui peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi, yang umumnya diukur menggunakan indikator Produk Domestik Bruto (GDP) (Fitri et al., 2024). Sebagai persoalan fundamental dalam perekonomian, pertumbuhan ekonomi mencerminkan dinamika ekonomi suatu negara dalam jangka panjang (Hasan et al., 2015). Selain itu, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai berkembangnya aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat secara berkelanjutan (Wahyuningrum & Juliprijanto, 2022). Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat menghadapi berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi cenderung melambat dalam beberapa tahun terakhir, dengan angka sekitar 4,36% pada tahun 2024 dan hanya 3,94% pada triwulan II tahun 2025, menjadikannya yang terendah di Pulau Sumatra. Struktur ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor pertanian dan jasa, sementara sektor industri pengolahan belum berkembang optimal. Selain itu, rendahnya investasi akibat keterbatasan infrastruktur dan iklim usaha yang belum kondusif turut memperlambat pertumbuhan. Permasalahan lain seperti serapan anggaran pemerintah yang rendah, tingginya tingkat pengangguran, dan ketergantungan pada konsumsi rumah tangga juga membuat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat kurang berkualitas dan belum mampu mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang diduga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran yang

digunakan untuk menilai dampak kinerja pembangunan suatu wilayah dengan cakupan dimensi yang luas, karena mencerminkan kualitas penduduk dalam aspek harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar hidup layak (Y. Sari et al., 2020). IPM disusun sebagai indeks komposit yang mencakup tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu pengetahuan, kesehatan yang direpresentasikan melalui angka harapan hidup, serta standar hidup layak (Mukaromah et al., 2022). Selain itu, IPM menggambarkan kemampuan penduduk dalam mengakses hasil pembangunan, termasuk dalam memperoleh pendapatan, layanan kesehatan, pendidikan, dan aspek kesejahteraan lainnya (Simangunsong, 2021). Secara konseptual, IPM digunakan sebagai alat perbandingan kualitas hidup antarwilayah atau antarnegara berdasarkan indikator harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup masyarakat (Prabowo et al., 2023). Dengan demikian, IPM menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas sumber daya manusia suatu negara atau wilayah (Ma'wa & Cahyadi, 2023).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk, sekaligus menggambarkan kemampuan masyarakat dalam mengakses hasil pembangunan seperti pendapatan, kesehatan, dan pendidikan (Isnaini et al., 2023). IPM disusun sebagai indeks komposit yang mencakup unsur utama pembangunan manusia, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan yang diukur melalui tingkat melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta standar hidup layak yang direpresentasikan oleh PDRB per kapita yang telah disesuaikan dengan daya beli (Asnidar, 2018). Sebagai indikator penting dalam pembangunan, IPM mencerminkan tingkat keberhasilan suatu wilayah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya (Arifin & Fadllan, 2021). Secara metodologis, IPM dihitung sebagai rata-rata dari tiga indeks

utama yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam mengembangkan pilihannya, yaitu indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak (Nasyri et al., 2024). Selain itu, IPM juga digunakan sebagai indikator pembangunan ekonomi yang mengukur kualitas fisik dan nonfisik penduduk, meliputi aspek kesehatan, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi masyarakat (Utami, 2020).

Temuan penelitian terdahulu menemukan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Utami, 2020); (Arifin & Fadllan, 2021); (Dinarjito & Dharmazi, 2020); (Istianto et al., 2021); (Damanik & Lubis, 2022); (Mulida et al., 2022); (Damanik & Purba Elidawaty, 2022); (Isnaini et al., 2023); (Simangunsong, 2021); (Pengaruh et al., 2022); (Y. Sari et al., 2020). Namun ada penelitian lain yang menemukan bahwa indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Kristina et al., 2022); (Asnidar, 2018); (Ma'wa & Cahyadi, 2023); (Prabowo et al., 2023); (Mukaromah et al., 2022).

Permasalahan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Barat pada umumnya masih berkaitan dengan adanya ketimpangan antarwilayah serta kualitas komponen penyusun IPM itu sendiri. Walaupun secara agregat IPM Sumatera Barat tergolong cukup baik, masih terdapat sejumlah kabupaten/kota yang memiliki tingkat IPM relatif rendah, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan. Permasalahan tersebut terutama terlihat pada sektor pendidikan, seperti belum meratanya rata-rata lama sekolah, serta pada sektor kesehatan yang berkaitan dengan keterbatasan akses dan mutu pelayanan kesehatan di beberapa daerah. Selain itu, dari aspek standar hidup layak, ketimpangan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja menyebabkan daya beli sebagian masyarakat masih tergolong rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan IPM di

Sumatera Barat tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memerlukan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan antarwilayah.

Faktor berikutnya yang diduga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen dalam kebijakan fiskal yang digunakan untuk membiayai berbagai aktivitas negara, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif (Tondi et al., 2025). Sebagai bagian dari kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah mencerminkan tindakan pemerintah dalam mengendalikan perekonomian melalui penetapan besaran penerimaan dan belanja setiap tahun, yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tingkat nasional serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat daerah atau regional (Putri et al., 2018). Pengeluaran pemerintah juga dipahami sebagai keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menyediakan barang dan jasa publik bagi masyarakat (Fitri et al., 2024). Selain itu, pengeluaran pemerintah mencakup aktivitas pembelian faktor-faktor produksi (input) maupun hasil produksi (output) yang dilakukan oleh pemerintah (Angraini et al., 2023). (Mahzalena & Juliansyah, 2019). Secara keseluruhan, pengeluaran pemerintah merupakan rangkaian kebijakan dan keputusan pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang publik dan layanan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pengelolaan perekonomian (Halimah et al., 2024).

Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang bersifat habis digunakan dalam proses produksi, yang mencakup pembelian barang dan jasa, pembayaran imbalan jasa kepada pegawai, serta penyusutan barang modal, setelah dikurangi dengan nilai barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah melalui aktivitas pasar yang tidak terpisahkan dari kegiatan pemerintahan (Pangiuk, 2017). Selain itu, pengeluaran pemerintah dapat

dipahami sebagai serangkaian keputusan dan aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam menyediakan barang publik dan pelayanan bagi masyarakat (Andriyani & Nurmauliza, 2018). Pengeluaran pemerintah juga didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas produksi perekonomian guna mendorong peningkatan pendapatan dan output nasional (Wahyuningrum & Juliprijanto, 2022). Dalam konteks kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian melalui penetapan besaran penerimaan dan pengeluaran setiap tahun, dengan tujuan menjaga stabilitas harga, meningkatkan tingkat output, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi (Riani & Nelvia Iryani, 2023). Lebih lanjut, pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bentuk peran pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara secara sistematis (Rahmawati, 2023).

Temuan penelitian terdahulu menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Riani & Nelvia Iryani, 2023); (M. Sari et al., 2016); (Wahyuningrum & Juliprijanto, 2022); (Andriyani & Nurmauliza, 2018); (Pangiuk, 2017); (Rahmawati, 2023); (MS, 2017); (Tondi et al., 2025); (Amanda & Murwiati, 2025); (Putri et al., 2018); (Hasan et al., 2015); (Anitasari & Soleh, 2025); (Prasasti, 2022). Namun ada penelitian lain yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Fitri et al., 2024); (Angraini et al., 2023); (Mahzalena & Juliansyah, 2019); (Lebang et al., n.d.); (Widianatasari & Purwanti, 2021).

Permasalahan pengeluaran pemerintah di Provinsi Sumatera Barat terutama berkaitan dengan rendahnya efektivitas serta keterlambatan dalam

penyerapan anggaran. Sejumlah program dan kegiatan pembangunan mengalami penundaan akibat proses perencanaan dan administrasi yang belum berjalan optimal, sehingga realisasi belanja, khususnya belanja modal, cenderung terakumulasi pada akhir tahun anggaran. Kondisi ini menyebabkan kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat belum berjalan secara maksimal. Di samping itu, sebagian besar anggaran masih dialokasikan untuk belanja rutin, seperti pembayaran gaji pegawai, sementara porsi belanja pada sektor-sektor produktif, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, belum dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, pengeluaran pemerintah belum mampu berperan secara efektif sebagai penggerak utama dalam mempercepat pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian Asosiatif adalah Penelitian ini yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih (Machali, 2021). Objek penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yaitu 12 Kabupaten dan 7 Kota. Jenis data adalah data Panel periode 2020-2024. Data yang digunakan berupa data panel selama periode 2020–2024, yaitu kombinasi antara data runtut waktu (time series) dan data silang (cross section)(Basuki, 2021). Data penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Variabel terikat adalah pertumbuhan ekonomi, yang didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan jangka panjang suatu negara untuk memproduksi berbagai barang dan jasa bagi rakyatnya (Simanungkalit, 2020). Variabel bebas pertama adalah indeks pembangunan manusia, yaitu indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan

kualitas hidup manusia, sekaligus menggambarkan kemampuan masyarakat dalam mengakses hasil pembangunan seperti pendapatan, kesehatan, dan pendidikan(Isnaini et al., 2023). Variabel bebas kedua adalah pengeluaran pemerintah, yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal berupa tindakan pemerintah dalam mengelola perekonomian melalui penetapan besaran penerimaan dan pengeluaran setiap tahunnya, sebagaimana tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tingkat nasional serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat daerah atau regional (Anitasari & Soleh, 2025).

Teknik analisis data menguji hipotesis adalah regresi berganda. Regresi berganda adalah salah satu metode analisis multivariat yang dimanfaatkan untuk meneliti hubungan antara satu variabel dependen atau kriteria (Y) dengan gabungan dua variabel independen atau prediktor (X) atau lebih.(Machali, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera secara persial maupun secara simultan. Berikut ini di sajikan deskriptif masing masing variabel :

Keterangan :

PE = Pertumbuhan ekonomi (%)

IPM = Indeks pembangunan manusia (%)

PP = Pengeluaran pemerintah (%)

Tabel 1 Uji Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.394734	(18,74)	0.0046
Cross-section Chi-square	43.605725	18	0.0007

Berdasarkan hasil Redundant Fixed Effects Tests, diperoleh nilai probabilitas Cross-section F sebesar 0,0046 dan Cross-section Chi-square sebesar 0,0007. Kedua nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen, sehingga hipotesis nol yang menyatakan bahwa model Common Effect sudah memadai ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model Fixed Effect lebih tepat digunakan, karena terdapat perbedaan karakteristik yang signifikan antar unit cross-section dalam data panel yang dianalisis.

Hasil estimasi menggunakan Fixed Effect Model dengan metode Panel Least Squares menunjukkan bahwa variabel IPM dan PP memiliki arah koefisien positif terhadap variabel dependen PE. Namun demikian, kedua variabel tersebut tidak signifikan secara statistik, yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas IPM sebesar 0,1618 dan PP sebesar 0,4189, yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa secara parsial IPM dan PP belum mampu memberikan pengaruh yang berarti terhadap perubahan PE selama periode penelitian 2020–2024.

Ditinjau dari kemampuan penjelasan model, nilai R-squared sebesar 0,0282 dan Adjusted R-squared sebesar 0,0071 menunjukkan bahwa model hanya mampu menjelaskan sekitar 2 hingga 3 persen variasi PE, sementara sebagian besar variasi lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar model. Selain itu, nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,2680, yang lebih besar dari 0,05, mengindikasikan bahwa secara simultan variabel IPM dan PP tidak berpengaruh signifikan terhadap PE. Dengan demikian, meskipun Fixed Effect Model merupakan model yang paling sesuai berdasarkan pengujian, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini masih memiliki daya jelaskan yang terbatas, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain atau mengembangkan spesifikasi model agar mampu menjelaskan variasi PE secara lebih komprehensif.

Tabel 2. Uji Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	41.623383	2	0.0000

** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
IPM	1.747922	0.080869	0.143940	0.0000
PP	0.002458	0.000500	0.000008	0.4892

Berdasarkan hasil uji Hausman (Correlated Random Effects), diperoleh nilai Chi-square statistic sebesar 41,62338 dengan tingkat probabilitas 0,0000, yang berada di bawah taraf signifikansi 5 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis nol yang menyatakan model Random Effect lebih sesuai harus ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model Fixed Effect merupakan model yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini, karena terdapat hubungan antara efek individual (cross-section) dengan variabel-variabel independen dalam model.

Temuan uji Hausman juga memperlihatkan adanya perbedaan nilai koefisien antara model Fixed Effect dan Random Effect, khususnya pada variabel IPM, yang menunjukkan selisih koefisien yang relatif besar dan signifikan. Kondisi ini semakin menguatkan dasar pemilihan model Fixed Effect dibandingkan Random Effect. Selain itu, adanya peringatan bahwa varians efek acak bernilai nol mengindikasikan bahwa asumsi utama dalam model Random Effect tidak terpenuhi secara optimal pada penelitian ini.

Selanjutnya, hasil estimasi menggunakan Fixed Effect Model menunjukkan bahwa variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap PE, dengan nilai koefisien sebesar 1,747922 dan probabilitas sebesar 0,0000. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan IPM secara nyata mampu mendorong peningkatan PE. Di sisi lain, variabel PP memiliki arah koefisien positif namun tidak signifikan secara statistik, yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,3967, sehingga

secara parsial PP tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap PE. Nilai konstanta yang negatif dan signifikan mengindikasikan bahwa tanpa pengaruh variabel independen, tingkat PE cenderung berada pada kondisi yang relatif rendah.

Dari aspek kelayakan model, nilai R-squared sebesar 0,3859 dan Adjusted R-squared sebesar 0,2199 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 38,6 persen variasi PE, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model. Selain itu, nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,0047, yang lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa secara simultan variabel IPM dan PP berpengaruh signifikan terhadap PE. Dengan demikian, model Fixed Effect yang digunakan dapat dinilai cukup baik dan layak dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen *toggle*** dan PE selama periode penelitian 2020–2024.

Tabel 3 Hasil Estimasi Regresi / Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
IPM	1.747922	0.382784	4.566341	0.0000
PP	0.002458	0.002883	0.852542	0.3967
C	-130.0169	26.76697	-4.857363	0.0000

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.385920	Mean dependent var	2.921789
Adjusted R-squared	0.219953	S.D. dependent var	2.627232
S.E. of regression	2.320379	Akaike info criterion	4.713632
Sum squared resid	398.4278	Schwarz criterion	5.278173
Log likelihood	-202.8975	Hannan-Quinn criter.	4.941749
F-statistic	2.325275	Durbin-Watson stat	1.849066
Prob(F-statistic)	0.004715		

Secara individual, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar 1,7479 serta nilai probabilitas 0,0000 pada tingkat signifikansi 5 persen. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam IPM mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi, di mana setiap kenaikan satu poin IPM berpotensi

meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 1,75 poin, dengan asumsi variabel lain tetap. Hasil ini menegaskan bahwa aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung kinerja ekonomi daerah.

Di sisi lain, variabel PP memiliki koefisien positif sebesar 0,0025, namun tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik dengan nilai probabilitas 0,3967. Hal ini mengindikasikan bahwa selama periode penelitian, PP belum memberikan dampak yang berarti terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketidaksignifikanan tersebut dapat disebabkan oleh pengaruh PP yang cenderung bersifat jangka panjang, implementasi yang belum optimal, atau adanya variabel lain yang lebih dominan dalam memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Nilai R-squared sebesar 0,3859 menunjukkan bahwa sekitar 38,6 persen variasi pertumbuhan ekonomi mampu dijelaskan oleh variabel IPM dan PP dalam model, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model. Setelah dilakukan penyesuaian, nilai Adjusted R-squared sebesar 0,2199 mencerminkan kemampuan penjelasan model yang tergolong moderat dan masih dapat diterima dalam konteks penelitian sosial ekonomi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas manusia melalui IPM merupakan faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan PP belum menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial dalam model penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pengeluaran Pemerintah secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2020–2024, yang menunjukkan bahwa kedua

variabel tersebut berperan dalam menjelaskan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah. Secara parsial, IPM terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi serta kinerja ekonomi daerah. Sebaliknya, pengeluaran pemerintah meskipun memiliki pengaruh positif, namun tidak menunjukkan signifikansi secara statistik, yang menandakan bahwa selama periode penelitian pengeluaran pemerintah belum memberikan dampak yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut diduga disebabkan oleh belum optimalnya efektivitas penyerapan anggaran, dominasi belanja rutin dibandingkan belanja produktif, serta keterlambatan pelaksanaan program pembangunan, sehingga efek ekonomi yang dihasilkan masih terbatas. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan manusia merupakan faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara pengelolaan dan alokasi pengeluaran pemerintah perlu ditingkatkan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan produktif agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, saran, serta bimbingan selama proses penyusunan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Program Studi

Pendidikan Ekonomi Universitas PGRI Sumatera Barat atas dukungan akademik yang diberikan selama pelaksanaan penelitian.

Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Penghargaan yang sebesar-besarnya juga diberikan kepada keluarga, sahabat, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, S., & Murwiati, A. (2025). Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Inflasi dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2023. *Shantika. Economics and Digital Business Review*, 6(2), 13–26. <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/2228>
- Andriyani, D., & Nurmauliza. (2018). Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2007-2016. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 1(1), 8–14.
- Angraini, D., Fathiyah, F., & Masnun, M. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Ekonomi dan Pelayanan Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 157. <https://doi.org/10.33087/eksis.v14i2.408>
- Anitasari, M., & Soleh, A. (2025). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu. *Ekombies Review*, 3(2), 117–127.
- Arifin, S. R., & Fadllan. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM

-) dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2018. *Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 8(1). <https://doi.org/10.1905/iqtishadia.v8i1.4555>
- Asnidar. (2018). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Aceh Timur. *JURNAL SAMUDRA EKONOMIKA*, 2(1), 1–12.
- Basuki, A. T. (2021). *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Dilengkapi dengan Penggunaan Eviews)* (1st ed.).
- Damanik, D., & Lubis, I. (2022). ANALISIS PENGARUH DEMOKRASI, JUMLAH PENDUDUK, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PULAU SUMATERA. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 1, 503–515.
- Damanik, D., & Purba Elidawaty. (2022). PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA PEMATANGSIANTAR. *JURNAL Edueco*, 5(1).
- Dinarjito, A., & Dharmazi, A. (2020). Indeks pembangunan manusia merupakan cara untuk menilai kualitas SDM pada suatu negara. *PKN: Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2(1).
- Doni, A. H. (2022). Analisis Pengaruh Inflasi dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat. *JUSIE (Jurnal Sosial Dan Ilmu Ekonomi)*, 7(01), 21–33. <https://doi.org/10.36665/jusie.v7i01.614>
- Fitri, S. L., Andiny, P., Rizal, Y., & Safuridar. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Laju Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 3(1), 133–144. <https://doi.org/10.61132/jepi.v3i1.1102>
- Halimah, U. nur, Wullandari, M., Rivaldo, A. D., & Noviarita, H. (2024). Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Masyarakat Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Analisis Multidisiplin*, 1(4), 7–16.
- Hasan, E., Amar, S., & Anis, A. (2015). Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat (Yulina Eliza). *Pekbis Jurnal*, 7(3), 200–210.
- Isnaini, A., Sarviah, S. N., & Ratnasari, E. D. (2023). ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, JUMLAH TENAGA KERJA, RASIO KETERGANTUNGAN DAN RASIO JENIS KELAMIN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2021. *TRANSEKONOMIKA: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan ANALISIS*, 3(3), 601–614.
- Istianto, T., Kumenaung, A. G., & Lopian, A. L. C. (2021). ANALISIS PENGARUH BELANJA DAERAH DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN DAN KOTA DI BOLAANG MONGONDOW RAYA. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 5(3), 75–95.
- Kristina, F., Angeliani, F., Nurhayati, Hidayat, F. N., Malaifani, serlince R. O., Sadjarto, A., & Rina, L. (2022). Pengaruh Pengangguran Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali. *JURNAL NUANSA AKADEMIK*, 7(2), 299–314.
- Lebang, L. I. A., Rotinsulu, D. C., &

- Kawung, G. M. . (n.d.). ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI SWASTA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA BITUNG Lisa. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Universitas*, 1–10.
- Ma'wa, R., & Cahyadi, I. F. (2023). Pengaruh Inflasi , Indeks Pembangunan Manusia , dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015- 2021 dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kabupaten Kudus). *JEBISKU: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Kudus*, 1(1), 97–113.
- Machali, I. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif* (A. Q. Habib (ed.); 3rd ed.).
- Mahzalena, Y., & Juliansyah, H. (2019). Pengaruh Inflasi, Pengeluaran Pemerintah Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 2(1), 37. <https://doi.org/10.29103/jeru.v2i1.1742>
- Mayasari, F., & Mahinshapuri, Y. fahra. (2022). PENGARUH INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JEB 17 Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 7(2), 119–132.
- MS, M. Z. (2017). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi. *EKONOMIS : Journal of Economics and Business*, 1(1), 180. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v1i1.18>
- Mukaromah, L., Hanifatuzzahra, Z., Nasrullah, A., Latifah, T. M., Ekonomi, F., & Lampung, U. (2022). PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM), TINGKAT UPAH MINIMUM , DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2022. *JURNAL ILMIAH FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS FLORES*, 13(02), 228–245. <https://doi.org/10.37478/als.v13i2.2874>
- Mulida, Y., Hamid, A., & Hasibuan, faisal U. (2022). Pengaruh Investasi, Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *JIM (Jurnal Ilmiah Mahasiswa)*, 4(1), 21–38.
- Nasyri, I. A., Harsono, I., Yuniarti, T., Sutanto, H., & Suprapti, I. A. P. (2024). Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018-2022. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Educational Research Vol.*, 1(2).
- Pangiuk, A. (2017). Pengaruh Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi (Studi Tahun 2012-2015). *ILTIZAM Journal of Sharia Economic Research*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v1i1.90>
- Pengaruh, A., Pembangunan, I., Kerja, T., Ayu, F., Asmoro, F., Hasmarini, M. I., & Fakhruddin, H. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tenaga Kerja, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2008-2021. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1788–1794. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.3023>
- Prabowo, D., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2023). Pengaruh Pengangguran, Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, dan Populasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 3(1), 27–36. <https://doi.org/10.11594/jesi.03.01.0>

- Prasasti, D. (2022). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten & Kota Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 6(3), 478–490.
- Putri, R. P., Heriberta, H., & Emilia, E. (2018). Pengaruh inflasi, investasi asing langsung dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 13(2), 95–104.
<https://doi.org/10.22437/paradigma.v13i2.6625>
- Rahmawati, H. (2023). Analisis Fungsi Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. *Jurnal STEI Ekonomi*, 31(02), 77–82.
<https://doi.org/10.36406/jemi.v31i02.745>
- Riani, I. N., & Nelvia Iryani. (2023). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Ekspor, Dan Pembentukan Modal Tetap Bruto Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 195–205.
<https://doi.org/10.36985/ekuilmomi.v5i2.702>
- Saefulloh, M. H. M., Fahlevi, M. R., & Centauri, S. A. (2023). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 327–340.
<https://doi.org/10.35508/jom.v13i3.3311>
- Sari, M., Syechalad, M. nur, & Majid, S. A. (2016). Pengaruh Investasi Asing Langsung, Tenaga Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK*, 3(2), 1–20.
<https://doi.org/10.32505/jim.v5i1.5893>
- Sari, Y., Nasrun, A., & Putri, A. K. (2020). ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEMISKINAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2010-2017. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 8(1), 4–6.
- Simangunsong, S. R. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB di Kabupaten Tapanuli Tengah. *SENASHTEK 2024*, 383–389.
- Simanungkalit, E. F. B. (2020). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Journal of Management*, 13(3), 327–340.
<https://media.neliti.com/media/publications/332928-pengaruh-inflasi-terhadap-pertumbuhan-ek-ead63671.pdf>
- Tondi, L., Ardiansyah, F., & Rostin. (2025). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Kendari Tahun 2000–2023. *Jurnal Embistek Ekonomi, Manajemen Bisnis, Syariah, Dan Teknologi*, 4(3), 634–647.
- Utami, F. P. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *JURNAL SAMUDRA EKONOMIKA*, 4(2), 101–113.
- Wahyuningrum, P. S., & Juliprijanto, W. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Transekonomika: Akutansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(6), 268–276.
- Widianatasari, A., & Purwanti, E. Y. (2021). Pengaruh Kualitas Institusi, Pengeluaran Pemerintah, dan Foreign Direct Investment terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 4(2), 86–98